



Gorontalo Development Review

<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gdrev>

Vol 8, No 2, Tahun 2025

P-ISSN : 2614-5170, E- ISSN : 2615-1375

Nationally Accredited Journal, Decree No.225/E/KPT/2022

LOCATION QUOTIENT (LQ) DALAM PENENTUAN SEKTOR BASIS DAN SEKTOR NON BASIS DI KABUPATEN BERAU

Location Quality Analysis (LQ) in Determining Basic and Non-Basic Sectors in Berau Regency

Lisa puspitasari¹, Muhammad Bayu², Almani³

^{1,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Berau

²Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Berau

Email¹: Lisapuspita.kre@gmail.com

Article info

Article history:

Received; 16-09-2025

Revised; 28-10-2025

Accepted; 31-10-2025

Abstract.

The study aims to analyze the regional economy of Berau Regency. The research method used is the Location Quotient (LQ) analysis to determine the basic and non-basic sectors. This study utilizes secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) for the period 2016–2022. The results of the study indicate that there are eight basic sectors, namely: the mining and quarrying sector, the real estate sector, the education services sector, the health services and social activities sector, the transportation and warehousing sector, the public administration, defense, and social security sector, the agriculture, forestry, and fisheries sector, and the other services sector. These sectors are classified as basic sectors in Berau Regency because they have LQ values greater than 1 ($LQ > 1$). The basic sectors are capable of meeting the needs of the Berau community as well as markets outside Berau Regency. Furthermore, the study also reveals that there are nine non-basic sectors, namely: the electricity and gas supply sector, the manufacturing sector, the water supply, waste management, and recycling sector, the construction sector, the wholesale and retail trade sector, the accommodation and food service sector, the information and communication sector, the financial and insurance services sector, and the business services sector. These sectors are considered non-basic because they have LQ values less than 1 ($LQ < 1$), meaning they can only meet the needs within the region itself

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis perekonomian daerah Kabupaten Berau. Metode penelitian yang

digunakan adalah menggunakan analisis Location Quotient (LQ) untuk menentukan sektor basis dan sektor non basis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2016 – 2022. Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat 8 sektor basis yang mana di antaranya adalah sektor pertambangan & penggalan, sektor real estat, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan & kegiatan sosial, sektor transportasi & pergudangan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan & jaminan sosial, sektor pertanian, kehutanan & perikanan, serta sektor jasa lainnya juga merupakan sektor basis di Kabupaten Berau karena memiliki jumlah atau nilai LQ >1. Sektor basis tersebut mampu memenuhi kebutuhan pasar masyarakat Kabupaten Berau maupun pasar di luar daerah Kabupaten Berau. Dan juga menyatakan bahwa terdapat 9 (sembilan) sektor non basis di antaranya adalah sektor pengadaan listrik & gas, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar & eceran, sektor penyediaan akomodasi & makan minum, sektor informasi & komunikasi, sektor jasa keuangan & asuransi, serta sektor jasa perusahaan karena memiliki nilai LQ <1. Sektor non basis tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri.

Keywords:

*Base sector;
Non base sector;
Location Quotient*

Corresponden author:

Email: Lisapuspita.kre@gmail.com

Pendahuluan

Pembangunan daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian, dan keberhasilannya umumnya diukur dari kemampuan daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan penduduknya (Sernasari & Puspitasari, 2020). Penerapan otonomi daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (2004) memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola kewenangan, potensi, dan sumber daya sesuai karakteristik wilayahnya. Namun, dalam era otonomi saat ini, pembangunan daerah menjadi semakin kompleks karena adanya kesenjangan antarwilayah, peningkatan arus globalisasi, dan persaingan antar daerah yang semakin ketat (Muda rajad, 2014). Kondisi ini menuntut setiap daerah untuk mampu meningkatkan daya saing dan menentukan sektor-sektor ekonomi unggulan sebagai penggerak utama perekonomian (Sjafrizal, 2014). Perbedaan kondisi demografis, sumber daya alam, dan sosial budaya membuat potensi antar daerah tidak sama, sehingga perencanaan pembangunan ekonomi daerah harus disusun sesuai potensi lokal dan aspirasi masyarakat agar pemanfaatan sumber daya menjadi optimal (Arsyad, 2016; Basuki & Mujiraharjo, 2017).

Kabupaten Berau sebagai salah satu dari tujuh kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah dengan sumber daya ekonomi yang

melimpah. Wilayah ini memiliki potensi besar pada sektor pertambangan dan penggalian, kehutanan, perikanan, serta didukung pula oleh sektor pertanian dan pariwisata pesisir. Meski demikian, besarnya potensi tidak selalu tercermin dalam kinerja pertumbuhan ekonomi daerah karena belum semua sektor mampu dikembangkan secara optimal. Oleh sebab itu, diperlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi sektor-sektor basis yang benar-benar menjadi motor pertumbuhan sekaligus sektor yang prospektif bagi investasi. Investor umumnya akan mengalokasikan modal pada sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan prospek pertumbuhan yang jelas, dan keputusan investasi tersebut akan mendorong pengeluaran modal, pembangunan infrastruktur, serta penyerapan tenaga kerja sehingga memberi efek ganda bagi perekonomian daerah. Pembangunan yang diarahkan pada sektor basis juga memungkinkan tercapainya tujuan pertumbuhan sekaligus pemerataan, karena sektor unggulan umumnya memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan yang kuat dalam perekonomian daerah (Kuncoro dan Muda rajad, 2010).

Data PDRB Kabupaten Berau menunjukkan bahwa struktur ekonominya masih sangat bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian yang pada 2021–2022 menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB daerah. Di bawahnya terdapat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang juga memberikan kontribusi cukup besar, sementara beberapa sektor seperti pengadaan listrik dan gas, jasa perusahaan, dan pengelolaan sampah memberikan kontribusi relatif kecil. Pola ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Berau cenderung kurang terdiversifikasi dan masih bergantung pada sektor-sektor ekstraktif yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan dinamika pasar global. Pada saat yang sama, Kabupaten Berau menghadapi tantangan arus migrasi yang cukup tinggi sehingga diperlukan penciptaan lapangan kerja baru dan penguatan sektor-sektor yang bersifat padat karya agar masalah pengangguran dan sosial ekonomi tidak berkembang.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan menyediakan potret terkini mengenai struktur perekonomian Kabupaten Berau sebagai dasar perencanaan pembangunan. Penelitian terdahulu yang dilakukan Fadelan (2017) dengan pendekatan Location Quotient (LQ) memang telah mengidentifikasi 10 sektor unggulan dari 17 sektor lapangan usaha. Namun, hasil tersebut hanya mencerminkan kondisi sebelum 2017. Perkembangan infrastruktur, peningkatan aktivitas sektor jasa, dinamika industri ekstraktif, dan penyesuaian kebijakan daerah dalam kurun 2016–2022 sangat mungkin mengubah peranan sektoral terhadap PDRB. Karena itu, diperlukan analisis ulang menggunakan data yang lebih mutakhir agar pemerintah daerah dapat mengetahui apakah sektor basis sebelumnya masih relevan, sektor mana yang mulai mengalami kejenuhan, dan sektor baru apa yang mulai tumbuh. Dengan pemetaan sektor basis dan non-basis yang lebih aktual, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi penguatan sektor unggulan, mendorong hilirisasi sumber daya alam, memperluas basis pariwisata dan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal, sekaligus menyusun kebijakan investasi yang lebih terarah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan calon investor dalam menyusun prioritas pembangunan dan alokasi sumber daya yang berorientasi pada keberlanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang di mana dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha tahun 2016-2022. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang menunjukkan sektor basis dan non basis dengan analisis LQ. (Muljarijadi, 2017) analisis *Location Quotient* (LQ) pada sektor tertentu membandingkan sumbangan (*share*) sektor tertentu terhadap total tenaga kerja pada tingkat wilayah atau lokal dengan sumbangan sektor yang sama terhadap total output pada tingkat nasional. Pernyataan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$LQ_i = \frac{v_i/v_t}{y_i/y_t}$$

Dimana :

LQ_i = Besarnya nilai *Location Quotient* sektor *i* di suatu wilayah

v_i = Nilai PDRB sektor *i* ada tingkat wilayah yang lebih rendah

v_t = Total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih rendah

y_i = Nilai PDRB sektor *i* ada tingkat wilayah yang lebih atas

y_t = Total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih atas

Jika nilai $LQ > 1$ maka sektor *i* di wilayah tersebut terspesialisasi di bandingkan dengan sektor yang sama pada wilayah referensi atau dengan kata lain sektor tersebut merupakan sektor yang mampu mengekspor produknya (sektor unggulan). Jika nilai $LQ < 1$ maka sektor *i* di wilayah analisis kurang terspesialisasi dibandingkan dengan sektor yang sama pada wilayah referensi atau dengan kata lain sektor tersebut tidak mampu mengekspor produknya (sektor non basis atau sektor non unggulan). Jika nilai $LQ = 1$ maka sektor *i* di wilayah memiliki tingkat spesialisasi yang sama dibandingkan dengan sektor yang sama pada wilayah referensi. Berarti sektor *i* mampu memenuhi kebutuhan wilayah sendiri. Arsyad (2016) menjelaskan bahwa dalam analisis LQ kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi kedalam dua golongan yaitu sektor basis adalah sektor ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan baik pasar lokal maupun pasar luar daerah artinya sektor basis dalam aktizitasnya dapat memenuhi kebutuhan daerah sendiri maupun daerah lain sehingga dapat dijadikan sektor basis atau sektor unggulan. Sektor non basis ialah sektor ekonomi yang hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri, sektor seperti ini dikenal sebagai sektor non basis atau sektor non unggulan. Artinya jika industri basis menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa untuk pasar didaerah maupun diluar daerah Kabupaten Berau maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah Kabupaten Berau. dengan dasar teori ini maka sektor basis perlu di prioritaskan untuk dikembangkan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah (Puspitasari, 2022).

Hasil Dan Pembahasan

Location Quotient digunakan untuk pengujian sektor-sektor ekonomi yang termasuk ke dalam kategori sektor unggulan (Arsyad, 2016). Muljarijadi (2017) analisis *Location Quotient* (LQ) pada sektor tertentu membandingkan sumbangan (*share*) sektor tertentu terhadap total tenaga kerja pada Kabupaten Berau dengan sumbangan sektor yang sama terhadap total output pada Provinsi Kalimantan Timur. Jika nilai $LQ > 1$ maka sektor *i* di wilayah tersebut terspesialisasi di bandingkan dengan sektor yang sama pada wilayah referensi atau dengan kata lain di Kabupaten Berau sektor tersebut merupakan sektor

yang mampu mengekspor produknya (sektor unggulan). Jika nilai $LQ < 1$ maka sektor i di wilayah analisis kurang terspesialisasi dibandingkan dengan sektor yang sama pada wilayah referensi atau dengan kata lain di Kabupaten Berau sektor tersebut tidak mampu mengekspor produknya (sektor non basis atau sektor non basis). Jika nilai $LQ = 1$ maka sektor i di Kabupaten Berau memiliki tingkat spesialisasi yang sama dibandingkan dengan sektor yang sama pada Provinsi Kalimantan Timur. Berarti sektor i mampu memenuhi kebutuhan di Kabupaten Berau. Di bawah ini menyajikan hasil analisis data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan PDRB ADHK tahun 2010 periode 2016-2022 pada 17 sektor di Kabupaten Berau membandingkannya dengan Provinsi Kalimantan Timur dengan analisis *Location Quotient*. LQ sebagai indikator untuk menentukan sektor potensial di suatu daerah dan menjadi peluang untuk mengembangkan sektor tersebut dimasa yang akan datang, karena sektor potensial akan mampu untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah. Jika sektor ekonomi menghasilkan barang dan jasa untuk pasar di Kabupaten Berau maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah Kabupaten Berau dengan adanya pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan nilai tambah ekonomi dalam PDRB Kabupaten Berau dan PDRB Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2016-2022 diperoleh hasil *Location Quotient*.

Berikut perhitungan analisis *Location Quotient (LQ)* setiap sektor ekonomi di Kabupaten Berau selama kurun waktu 7 tahun dari tahun 2016-2022 :

Tabel 1. analisis *Location Quotient (LQ)* setiap sektor ekonomi di Kabupaten Berau tahun 2016-2022 :

SEKTOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1.40129	0.14236	1.42712	1.39071	1.36099	1.35212	1.37177	1.206622
Pertambangan & Penggalian	1.31467	0.13379	1.32017	1.30347	1.31078	1.33519	1.33971	1.151111
Industri Pengolahan	0.18453	0.01879	0.19513	0.20195	0.20840	0.19187	0.19286	0.170504
Pengadaan Listrik & Gas	0.68848	0.07055	0.71571	0.70330	0.67374	0.64519	0.64538	0.591764
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.86132	0.08513	0.85211	0.85177	0.86099	0.64519	0.64538	0.739364
Konstruksi	0.61791	0.05722	0.53948	0.55040	0.50646	0.47779	0.47821	0.461068
Perdagangan Besar & Eceran	0.61791	0.05722	0.53948	0.55040	0.50646	0.47779	0.47821	0.461068
Transportasi & Pergudangan	1.72484	0.11514	1.71880	1.71136	1.77389	1.76436	1.68053	1.506594
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1.13374	0.11301	1.13589	1.08609	1.11045	1.07458	1.06583	0.955602
Informasi &	0.68175	0.06897	0.69796	0.69214	0.70169	0.66508	0.65816	0.595108

Komunikasi								
Jasa Keuangan & Asuransi	0.32331	0.03351	0.33771	0.33607	0.33147	0.31545	0.31437	0.284556
Real Estat	1.00562	0.10072	9.87685	0.98317	0.99409	0.99348	1.00191	2.136547
Jasa Perusahaan	0.48502	0.04904	0.48738	0.48489	0.47437	0.47771	0.47929	0.419672
Administrasi Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial	0.62459	0.06225	0.60828	5.99948	0.59238	0.56957	0.56519	1.288820
Jasa Pendidikan	1.70091	0.17084	1.68021	1.66146	1.69966	1.68845	1.71807	1.474229
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1.62304	0.16227	1.61090	1.61138	1.60738	1.67077	1.67724	1.423283
Jasa Lainnya	1.21750	0.12234	1.17596	1.15123	1.16762	1.14514	1.14970	1.018498

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan perhitungan dari LQ sektor pertanian, kehutanan & perikanan merupakan sektor basis karena hasil perhitungan LQ dalam periode 7 (tujuh) tahun dengan nilai rata-rata menunjukkan nilai $LQ > 1$, Perhitungan dari LQ sektor pertambangan & penggalan merupakan sektor basis karena hasil perhitungan LQ dalam periode 7 (tujuh) tahun dengan nilai rata-rata menunjukkan nilai $LQ > 1$, perhitungan dari LQ sektor industri pengolahan merupakan sektor non basis karena hasil perhitungan LQ dalam periode 7 (tujuh) tahun dengan nilai rata-rata menunjukkan nilai $LQ < 1$, perhitungan dari LQ sektor pengadaan listrik & gas merupakan sektor non basis karena hasil perhitungan LQ dalam periode 7 (tujuh) tahun dengan nilai rata-rata menunjukkan nilai $LQ < 1$, perhitungan dari LQ sektor pengadaan air, pengolahan sampah limbah & daur ulang merupakan sektor non basis karena hasil perhitungan LQ dalam periode 7 (tujuh) tahun dengan nilai rata-rata menunjukkan nilai $LQ < 1$.

Berdasarkan perhitungan dari LQ sektor konstruksi merupakan sektor non basis karena hasil perhitungan LQ dalam periode 7 (tujuh) tahun dengan nilai rata-rata menunjukkan nilai $LQ < 1$, perhitungan dari LQ sektor perdagangan besar & eceran merupakan sektor non basis karena hasil perhitungan LQ dalam periode 7 (tujuh) tahun dengan nilai rata-rata menunjukkan nilai $LQ < 1$, perhitungan dari LQ sektor transportasi & pergudangan merupakan sektor basis karena hasil perhitungan LQ dalam periode 7 (tujuh) tahun dengan nilai rata-rata menunjukkan nilai $LQ > 1$, perhitungan dari LQ sektor penyediaan akomodasi & makan minum merupakan sektor non basis karena hasil perhitungan LQ dalam periode 7 (tujuh) tahun dengan nilai rata-rata menunjukkan nilai $LQ < 1$, perhitungan dari LQ sektor informasi & komunikasi merupakan sektor non basis karena hasil perhitungan LQ dalam periode 7 (tujuh) tahun dengan nilai rata-rata menunjukkan nilai $LQ < 1$, perhitungan dari LQ sektor jasa keuangan &

asuransi merupakan sektor non basis karena hasil perhitungan LQ dalam periode 7 (tujuh) tahun dengan nilai rata-rata menunjukkan nilai $LQ < 1$, perhitungan dari LQ sektor real estat merupakan sektor basis karena hasil perhitungan LQ dalam periode 7 (tujuh) tahun dengan nilai rata-rata menunjukkan nilai $LQ > 1$, perhitungan dari LQ sektor jasa perusahaan merupakan sektor non basis karena hasil perhitungan LQ dalam periode 7 (tujuh) tahun dengan nilai rata-rata menunjukkan nilai $LQ < 1$, perhitungan dari LQ sektor administrasi pemerintah, ketahanan & jaminan sosial merupakan sektor basis karena hasil perhitungan LQ dalam periode 7 (tujuh) tahun dengan nilai rata-rata menunjukkan nilai $LQ > 1$, perhitungan dari LQ sektor jasa pendidikan merupakan sektor basis karena hasil perhitungan LQ dalam periode 7 (tujuh) tahun dengan nilai rata-rata menunjukkan nilai $LQ > 1$, perhitungan dari LQ sektor jasa kesehatan & kegiatan sosial merupakan sektor basis karena hasil perhitungan LQ dalam periode 7 (tujuh) tahun dengan nilai rata-rata menunjukkan nilai $LQ > 1$ dan perhitungan dari LQ sektor jasa lainnya merupakan sektor basis karena hasil perhitungan LQ dalam periode 7 (tujuh) tahun dengan nilai rata-rata menunjukkan nilai $LQ > 1$.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2016–2022 sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor basis utama di Kabupaten Berau. Di samping itu, beberapa sektor lain juga terbukti memiliki peran basis, yaitu sektor real estat, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor transportasi dan pergudangan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta sektor jasa lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) dapat diterima karena sebagian besar sektor tersebut memiliki nilai Location Quotient (LQ) lebih dari satu sehingga mampu menjadi penggerak perekonomian daerah. Selanjutnya, hasil analisis LQ juga menunjukkan bahwa pada periode yang sama terdapat sejumlah sektor yang masih tergolong non-basis, yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, serta sektor jasa perusahaan. Kondisi ini menguatkan hipotesis kedua (H2) bahwa tidak semua sektor memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Berau sehingga pengembangannya memerlukan perhatian kebijakan yang berbeda. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk terus mengoptimalkan sektor-sektor basis agar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah semakin besar, sekaligus memperkuat sektor-sektor non-basis melalui kebijakan, insentif, dan pembangunan infrastruktur ekonomi agar secara bertahap dapat naik kelas menjadi sektor basis. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan berlebihan pada sektor pertambangan dan penggalian yang sifatnya tidak terbarukan, dengan mendorong pengembangan sektor-sektor yang lebih berkelanjutan seperti pertanian dalam arti luas, perikanan, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Penguatan sektor-sektor tersebut, disertai penyediaan infrastruktur pendukung, bukan hanya akan memperluas

lapangan kerja dan meningkatkan ketahanan ekonomi lokal ketika terjadi guncangan eksternal, tetapi juga akan membantu mewujudkan pembangunan ekonomi Kabupaten Berau yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

a. Buku

- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi pembangunan (Edisi ke-5)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, M. (2010). *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Muljarijadi, B. (2017). *Pembangunan Ekonomi Wilayah: Pendekatan Analisis Tabel Input-Output*. Sumedang: Unpad Press.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Depok: Rajawali Pers.

b. Artikel

- Basuki, M., & Mujiraharjo, F. N. (2017). Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman dengan Metode Shift Share dan Location Quotient. *Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri*, 15(1), 52–60.
- Fadelan, N. (2017). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten Berau dengan Pendekatan Location Quation. *CAM JOURNAL: Change Agent For Management Journal*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.35915/cj.v1i1.82>
- Puspitasari, L. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Berau: Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Berau. *ECO-BUILD; Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.35915/ej.v6i1.666>
- Sernasari, J., & Puspitasari, L. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Berau: Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Berau. *ECO-BUILD; Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal*, 4(1), 25–32. <https://doi.org/10.35915/ej.v4i1.484>

c. Rujukan dan sumber website

- Badan Pusat Statistik. (2023). Kabupaten Berau dalam Angka 2023. Diakses dari <https://bps.go.id>
- Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (2004).